



Pengembangan SDM Pemerintahan Desa Pegayaman Dalam E-Government di Era Society 5.0

Nadiya Amaliya¹, Hikmah Muhaimin², Suprpto³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Majapahit¹⁻³

Email Korespondensi: nadiyaamaliya47@gmail.com, hikmahmuhaimin@gmail.com, suprpto@gmail.com

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 11 September 2025

ABSTRACT

The Society 5.0 era demands digital transformation in public service delivery, including at the village government level. This study aims to examine the implementation of e-government in Pegayaman Village and its contribution to the development of human resources (HR) in village governance in addressing the challenges of the digital era. This research employs a qualitative approach with a descriptive method, applying George C. Edwards III's policy implementation framework, which consists of four key variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of the Village Information System (SID) has improved the efficiency of public services and enhanced the capacity development of village officials, where in terms of communication, the village government successfully addressed digital literacy challenges through the use of social media and direct engagement; in terms of resources, despite the limited number of trained personnel and technological infrastructure, there is a strong commitment to continuous learning; and in terms of bureaucratic structure, the development of Standard Operating Procedures (SOPs) has facilitated digital transformation with a flexible and adaptive approach.

Keywords: E-Government, Village Government, Human Resources

ABSTRAK

Era Society 5.0 menuntut transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pada tingkat pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi e-government di Desa Pegayaman serta kontribusinya terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintahan desa dalam menghadapi tantangan era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, menerapkan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Desa (SID) telah meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mendorong pengembangan kapasitas SDM perangkat desa, di mana dari aspek komunikasi pemerintah desa berhasil mengatasi tantangan literasi digital melalui pemanfaatan media sosial dan komunikasi langsung, aspek sumber daya menghadapi keterbatasan SDM terlatih dan infrastruktur teknologi tetapi menunjukkan komitmen tinggi terhadap pembelajaran berkelanjutan, serta struktur birokrasi berhasil mengembangkan SOP yang memfasilitasi transformasi digital dengan pendekatan fleksibel dan adaptif.

Kata Kunci: E-Government, Pengembangan SDM, Pemerintahan Desa

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi elemen fundamental dalam tata kelola pemerintahan modern, termasuk pada level pemerintahan desa. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memungkinkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Konsep *e-government* menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Menurut laporan OECD (2023), negara-negara yang berhasil mengimplementasikan *e-government* secara efektif mengalami peningkatan signifikan dalam efisiensi pelayanan publik dan partisipasi masyarakat, sekaligus memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, peran *e-government* tidak hanya sebatas transformasi teknologi, tetapi juga menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan agenda pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang digitalisasi administrasi publik telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Regulasi ini menegaskan bahwa pemanfaatan TIK merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Namun, laporan UNDP (2023) menekankan bahwa kesenjangan kualitas infrastruktur dan literasi digital pada tingkat daerah masih menjadi tantangan signifikan. Banyak desa menghadapi kendala dalam akses jaringan internet, ketersediaan perangkat, dan kesiapan sumber daya manusia (SDM). Kondisi tersebut menjadikan penguatan kapasitas aparatur desa sebagai prioritas utama agar mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal dan mendukung pelayanan publik yang lebih inklusif dan adaptif di era globalisasi.

Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan *e-government* memerlukan kesiapan infrastruktur teknologi yang memadai, mekanisme manajemen data yang transparan, dan pengembangan kapasitas aparatur sebagai aktor utama pelayanan publik. Laporan World Bank (2023) menyoroti bahwa keberhasilan digitalisasi tata kelola publik pada tingkat lokal sangat bergantung pada investasi teknologi dan pelatihan SDM secara berkesinambungan. Implementasi Sistem Informasi Desa (SID), misalnya, dapat mempercepat proses administrasi kependudukan, perencanaan pembangunan, dan layanan berbasis data secara real-time. Dengan adanya infrastruktur teknologi yang memadai dan pemanfaatan digitalisasi secara tepat, pemerintah desa dapat meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

Namun, penerapan *e-government* di tingkat desa tidak lepas dari berbagai kendala, seperti kesenjangan literasi digital, keterbatasan SDM, dan perbedaan tingkat adaptasi masyarakat terhadap teknologi. Menurut penelitian Bertot, Estevez, & Janowski (2016), keberhasilan implementasi *e-government* pada tingkat lokal tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kapasitas aparatur desa dalam mengintegrasikan aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Di Desa Pegayaman, misalnya, masih ditemukan hambatan signifikan dalam pemanfaatan SID akibat keterbatasan infrastruktur digital dan minimnya

pemahaman masyarakat terhadap mekanisme administrasi berbasis teknologi. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan e-government memerlukan strategi adaptasi dan pelatihan yang terstruktur untuk memastikan pemerataan akses layanan digital.

Lebih jauh, integrasi konsep Society 5.0 menjadi relevan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan desa. Society 5.0 menekankan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendorong keberlanjutan pembangunan berbasis inklusivitas sosial. Menurut Fukuyama & Takeuchi (2023), konsep ini mendorong pemanfaatan teknologi secara holistik, bukan hanya untuk efisiensi layanan publik, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kompetensi digital. Dalam konteks Desa Pegayaman, implementasi e-government perlu diarahkan untuk memaksimalkan potensi teknologi sekaligus mengakomodasi karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga layanan publik berbasis digital dapat diakses oleh semua kelompok, termasuk kelompok rentan dengan literasi teknologi rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi e-government di Desa Pegayaman dengan menyoroti strategi pengembangan SDM, ketersediaan infrastruktur, efektivitas kebijakan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses digitalisasi layanan publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model tata kelola pemerintahan desa berbasis teknologi, memperkuat integrasi konsep Society 5.0, dan menawarkan rekomendasi praktis dalam merancang program pelatihan SDM berbasis teknologi informasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi *e-government* dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Desa Pegayaman. Lokasi penelitian dipilih secara purposif di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, karena desa ini merepresentasikan tantangan implementasi *e-government* pada tingkat pemerintahan desa. Subjek penelitian terdiri dari empat informan kunci yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses implementasi, yaitu Sekretaris Desa, perangkat desa/operator, dan perwakilan masyarakat. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yakni observasi langsung terhadap proses implementasi *e-government*, wawancara mendalam untuk menggali informasi tentang strategi pengembangan SDM, kendala, dan dampak penerapan, serta dokumentasi berupa foto, video, dan dokumen pendukung sebagai pelengkap data primer. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data untuk menyeleksi informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk deskripsi naratif yang terstruktur, dan penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi hasil temuan lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara komprehensif hubungan antara penerapan *e-government* dan peningkatan kapasitas SDM pada konteks pemerintahan desa di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi E-Government Pengembangan SDM Pemerintah Desa Pegayaman Berdasarkan Teori George C. Edwards III

Pemerintah menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan tata kelola organisasi dan member stakeholder layanan informasi yang tepat guna. (Roring dan Marlien T. Lopian 2021) Layanan digitalisasi pemerintah dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan internet. Dengan system digital, pekerjaan administrasi jadi lebih cepat dan rapi. Data yang tersimpan juga lebih aman dan mudah dicari, sehingga mengurangi risiko kehilangan dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, implementasi e-government dalam pengembangan SDM pemerintah Desa Pegayaman dianalisis menggunakan empat variabel utama dari teori George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini saling berinteraksi dan mempengaruhi keberhasilan implementasi e-government di era Society 5.0.

Implementasi E-Government Berdasarkan Perspektif Komunikasi

Aspek komunikasi dalam implementasi e-government di Desa Pegayaman memperlihatkan karakteristik yang menarik untuk dikaji. Dalam implementasi e-government, komunikasi menjadi fondasi utama. Temuan di Desa Pegayaman menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi dari pemerintah desa ke masyarakat menghadapi berbagai tantangan, terutama karena tingkat literasi digital masyarakat yang beragam. Ada warga yang sudah terbiasa dengan teknologi, namun tak sedikit pula yang masih gaptek. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa tidak hanya mengandalkan satu jalur komunikasi. Mereka memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp, pengumuman di masjid, bahkan komunikasi langsung dari rumah ke rumah. Cara-cara ini terbukti lebih efektif karena menyesuaikan dengan kebiasaan warga yang lebih suka ngobrol langsung atau menggunakan media yang sudah akrab di keseharian mereka.

Aspek komunikasi menjadi faktor fundamental dalam implementasi e-government di Desa Pegayaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, ditemukan bahwa komunikasi dalam implementasi e-government menghadapi berbagai tantangan signifikan yang mempengaruhi efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat.

Transmisi

Dalam implementasi e-government di Desa Pegayaman, menurut George C Edward perspektif transmisi dalam implementasi e-government dipahami sebagai faktor pertama yang berpengaruh dalam komunikasi kebijakan. Transmisi sebagai penyampaian informasi dari suatu pihak ke pihak lain. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Berdasarkan hasil penelitian, proses penyampaian informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat mengalami hambatan signifikan karena sebagian besar warga masih tergolong "gaptek" atau gagap teknologi. Namun, yang menarik dari

temuan di Desa Pegayaman adalah adaptasi yang dilakukan pemerintah desa dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp sebagai alternatif komunikasi yang lebih familiar bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan perangkat desa, komunikasi terkait implementasi e-government di Desa Pegayaman sudah berjalan cukup baik. Informasi mengenai penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) dan digitalisasi pelayanan publik disosialisasikan melalui rapat desa, papan pengumuman, dan media sosial desa. Namun, masih ada kendala dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama warga lanjut usia atau yang kurang familiar dengan teknologi. Untuk mengatasi hal ini, perangkat desa secara aktif memberikan penjelasan langsung dan pendampingan kepada warga yang membutuhkan bantuan, sehingga komunikasi dua arah tetap terjaga.

Kejelasan Pesan

Kejelasan komunikasi menjadi tantangan tersendiri karena informasi yang disampaikan sering kali dianggap sulit dipahami oleh warga. Banyak masyarakat merasa kebingungan saat mengakses informasi melalui website desa yang dianggap terlalu teknis, terutama terkait istilah atau tata cara penggunaan sistem digital desa. Kondisi ini diperparah oleh kesenjangan tingkat pendidikan di kalangan masyarakat, dimana sebagian sudah familiar dengan teknologi sementara sebagian lainnya belum pernah menggunakan komputer.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah desa menerapkan strategi bertahap dengan memastikan semua perangkat desa menguasai teknologi terlebih dahulu, baru kemudian menyosialisasikannya kepada masyarakat. Pendekatan dimulai dari kelompok usia muda yang dianggap lebih mudah beradaptasi dengan teknologi, sambil menyederhanakan bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi. Strategi ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya penyesuaian metode komunikasi agar dapat dipahami oleh berbagai latar belakang masyarakat.

Konsisten Dalam Penyampaian Kebijakan

Konsistensi komunikasi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap program e-government. Pemerintah Desa Pegayaman berhasil mempertahankan pesan yang konsisten tentang tujuan dan manfaat e-government meskipun menggunakan media komunikasi yang beragam. Penggunaan Facebook dan WhatsApp terbukti meningkatkan respons masyarakat karena platform ini lebih familiar dan mudah diakses dibandingkan media komunikasi formal.

Konsistensi pesan dari berbagai tingkatan pemerintah, mulai dari kepala desa hingga kepala banjar, terjaga dengan baik meskipun ada variasi dalam tingkat detail penyampaian. Strategi ini menunjukkan bahwa konsistensi komunikasi bukan hanya soal menggunakan satu media saja, tetapi juga tentang kemampuan beradaptasi dengan kebiasaan dan kemampuan masyarakat setempat tanpa mengorbankan inti pesan yang ingin disampaikan. Pendekatan ini

memungkinkan informasi tetap dapat tersampaikan secara efektif kepada seluruh lapisan masyarakat.

Implementasi E-Government Berdasarkan Perspektif Sumber Daya

Sumber daya, baik manusia maupun infrastruktur, sangat menentukan keberhasilan e-government. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kapasitas SDM di Desa Pegayaman masih perlu ditingkatkan. Walaupun sudah ada pelatihan, jumlah staf yang benar-benar menguasai teknologi masih terbatas. Komitmen untuk terus belajar memang sudah ada, tapi beban kerja yang besar dan keterbatasan staf menjadi hambatan tersendiri.

Variabel sumber daya mencakup indikator staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

Staf yang Kompeten

Keterbatasan staf yang terlatih dalam teknologi informasi menjadi hambatan utama, dimana meskipun pemerintah desa sudah melakukan pelatihan, masih banyak perangkat desa yang belum sepenuhnya menguasai sistem e-government. Beban kerja yang besar untuk melayani masyarakat tidak sebanding dengan jumlah tenaga ahli yang tersedia, namun komitmen seluruh perangkat desa untuk terus belajar dan tidak tertinggal dari perkembangan digitalisasi patut diapresiasi. Untuk mengatasi keterbatasan ini, pemerintah desa mengambil pendekatan humanis dengan membantu masyarakat, terutama generasi tua, dalam menggunakan aplikasi digital melalui layanan langsung di kantor desa, menunjukkan bahwa meskipun sumber daya terbatas, inovasi dalam pelayanan tetap dapat dilakukan.

Informasi yang Memadai

Keterbatasan informasi menjadi kendala signifikan karena sosialisasi dari pemerintah, kabupaten hanya dilakukan satu kali dalam setahun, jelas tidak mencukupi untuk mendukung pembelajaran berkelanjutan. Kondisi ini memaksa perangkat desa untuk belajar mandiri atau bertanya kepada desa lain yang lebih maju, yang berdampak pada kurang maksimalnya pemanfaatan fitur-fitur yang tersedia dalam sistem e-government. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan intensitas dan kualitas pendampingan teknis dari level pemerintahan yang lebih tinggi untuk memastikan keberlanjutan implementasi e-government di tingkat desa.

Wewenang yang Jelas

Meskipun pemerintah desa memiliki otoritas dalam mengimplementasikan sistem e-government, mereka masih bergantung pada koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk pengembangan fitur, dimana proses ini sering memakan waktu dan menghambat respons terhadap kebutuhan masyarakat. Rencana penambahan tenaga IT juga terkendala masalah anggaran, menunjukkan bahwa otonomi desa dalam pengembangan SDM di bidang teknologi masih terbatas dan memerlukan desentralisasi wewenang yang lebih besar. Namun,

pimpinan desa memiliki visi yang jelas dalam mendorong transformasi digital sebagai upaya mengikuti perkembangan era Society 5.0, dengan operator desa menunjukkan antusiasme tinggi meskipun mengakui adanya tantangan teknis dalam implementasinya.

Fasilitas yang Mendukung

Kualitas infrastruktur teknologi di Desa Pegayaman masih menjadi kendala utama, dengan koneksi internet yang tidak stabil dan keterbatasan perangkat komputer di kantor desa yang mengganggu proses pelayanan dan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Keterbatasan ini tidak hanya terjadi di kantor desa, tetapi juga dialami oleh masyarakat yang sebagian besar masih menggunakan perangkat lama dengan masalah teknis, dimana tidak semua warga memiliki akses internet memadai di rumah dan perangkat yang mendukung aplikasi digital desa. Upaya peningkatan fasilitas seperti upgrade internet dan penambahan perangkat komputer sedang dilakukan, namun prosesnya membutuhkan waktu dan anggaran yang tidak sedikit, menjadi pengingat bahwa implementasi e-government tidak hanya soal software dan pelatihan, tetapi juga membutuhkan dukungan hardware yang mumpuni.

Untuk masyarakat, khususnya generasi tua, perangkat desa bahkan harus membantu secara langsung dalam menginput data ke aplikasi. Ini menunjukkan bahwa pelayanan digital belum sepenuhnya bisa diakses mandiri oleh semua warga. Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti komputer dan internet yang belum stabil juga sering menghambat proses pelayanan. Tidak semua warga punya akses internet memadai di rumah, dan perangkat yang mereka miliki kadang tidak mendukung aplikasi digital desa. Oleh karena itu, upaya peningkatan infrastruktur dan pelatihan SDM menjadi sangat penting agar manfaat e-government bisa dirasakan secara merata.

Implementasi E-Government Berdasarkan Perspektif Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di Desa Pegayaman berperan dalam menciptakan mekanisme yang mendukung implementasi e-government melalui pembagian tugas yang jelas, dimana operator desa bertanggung jawab atas aspek teknis sementara perangkat lainnya membantu dalam sosialisasi kepada masyarakat. Struktur ini mencerminkan pemahaman bahwa implementasi e-government bukan hanya soal teknologi, tetapi juga membutuhkan reorganisasi tugas dan tanggung jawab yang mendukung transformasi digital.

Pemerintah desa telah mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup input data, pelayanan kepada masyarakat, hingga maintenance sistem untuk membantu perangkat desa bekerja secara terstandar dan mengurangi kesalahan operasional. Namun, implementasi SOP ini masih memerlukan penyesuaian dengan kondisi lapangan yang dinamis, terutama dalam hal fleksibilitas pelayanan kepada masyarakat dengan kebutuhan dan kemampuan teknologi yang beragam. Proses pembelajaran bertahap yang melibatkan semua perangkat desa menunjukkan bahwa struktur birokrasi tidak

hanya menciptakan aturan tetapi juga memfasilitasi proses adaptasi yang humanis dan realistis. Koordinasi antara pemerintah desa dan kabupaten sudah berjalan rutin dalam pelaporan dan permintaan bantuan teknis, namun untuk pengembangan fitur atau penyesuaian sistem, desa masih harus menunggu keputusan dari kabupaten sehingga kadang terjadi keterlambatan dalam merespons kebutuhan lokal. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme koordinasi yang lebih efisien agar desa bisa lebih fleksibel dalam mengelola sistem digital sesuai kebutuhan warganya.

Implementasi SID juga memperjelas alur kerja dan memudahkan monitoring serta evaluasi kinerja perangkat desa. Preferensi masyarakat untuk datang langsung ke kantor desa karena merasa lebih pasti dan bisa bertanya langsung juga diakomodasi dengan baik oleh struktur birokrasi yang ada, menunjukkan bahwa transformasi digital di tingkat desa harus mempertimbangkan aspek budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Proses pembelajaran bertahap yang melibatkan semua perangkat desa menunjukkan bahwa struktur birokrasi tidak hanya menciptakan aturan, tetapi juga memfasilitasi proses adaptasi yang humanis dan realistis.

Struktur birokrasi menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat yang heterogen melalui sistem pelayanan hibrida yang menggabungkan layanan digital dengan bantuan langsung dari perangkat desa, mencerminkan fleksibilitas dalam mengakomodasi keragaman kemampuan masyarakat. Pendekatan "kita tetap siapkan pelayanan manual juga" menunjukkan bahwa struktur birokrasi di era digital tidak harus sepenuhnya menggantikan pola lama, tetapi dapat mengintegrasikan keduanya untuk menciptakan pelayanan yang lebih inklusif. Preferensi masyarakat untuk datang langsung ke kantor desa karena merasa lebih pasti dan bisa bertanya langsung juga diakomodasi dengan baik, menunjukkan bahwa transformasi digital di tingkat desa harus mempertimbangkan aspek budaya dan kebiasaan masyarakat setempat dengan optimisme dan komitmen yang kuat dari aparatur desa terhadap keberlanjutan implementasi e-government.

SIMPULAN

Kesimpulan, implementasi e-government melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Pegayaman telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa, di mana digitalisasi pelayanan publik membuat proses administrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Perangkat desa kini dapat mengelola data kependudukan dan layanan administrasi dengan lebih cepat dan akurat, sehingga kualitas pelayanan publik meningkat. Transformasi digital ini juga mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) perangkat desa melalui pelatihan dan kolaborasi. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait literasi digital masyarakat dan infrastruktur teknologi yang belum merata. Pemerintah desa berusaha mengatasi kendala ini dengan menyediakan pelayanan manual sebagai alternatif dan mengadakan sosialisasi serta pelatihan. Keberhasilan implementasi e-government bergantung pada kolaborasi antara perangkat desa dan masyarakat, peningkatan

kompetensi SDM, serta dukungan fasilitas teknologi yang memadai, sehingga Desa Pegayaman berpotensi menjadi contoh desa digital yang mewujudkan pelayanan publik modern dan responsif di era Society 5.0.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardiyati. (2022). Implementasi e-government dalam pemerintahan Kecamatan Sedayu "Sedayu Smart District." *Journal Publicuho*, 5(3), 685–697. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.22>
- Bertot, J. C., Estevez, E., & Janowski, T. (2016). Digital public service innovation: Framework proposal. In *Proceedings of the 9th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance* (pp. 113–122). ACM. <https://doi.org/10.1145/2910019.2910037>
- Chow, Y. W., Pietranico, R., & Mukerji, A. (1975). Studies of oxygen binding energy to hemoglobin molecule. *Biochemical and Biophysical Research Communications*, 66(4), 1424–1431. [https://doi.org/10.1016/0006-291x\(75\)90518-5](https://doi.org/10.1016/0006-291x(75)90518-5)
- Fukuyama, F., & Takeuchi, H. (2023). *Society 5.0: Human-centric innovation in the digital era*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-19-9856-1>
- Heeks, R. (2005). E-government as a carrier of context. *Journal of Public Policy*, 25(1), 51–74. <https://doi.org/10.1017/S0143814X05000206>
- Imania, A. N., & Haryani, T. N. (2021). E-government di Kota Surakarta dilihat dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Wacana Publik*, 1(1), 176. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.53143>
- Jansen, A. (2012). The understanding of ICTs in public sector and its impact on governance. In H. J. Scholl, M. Janssen, M. A. Wimmer, C. E. Moe, & L. S. Flak (Eds.), *Lecture Notes in Computer Science: Vol. 7443. Electronic Government* (pp. 174–186). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-33489-4_15
- Muhaimin, H. (2024). Challenges of government ethics in human resource governance in village government in the digital era. *Journal of Governance and Innovation*, 2(3), 1–12.
- OECD. (2023). *Digital government review 2023: Transforming public service delivery*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/digital-gov-review2023-en>
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Choiriyah, I. U. (2021). Pengembangan kapasitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 32–41. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i1.5631>

-
- Roring, M. S., Mantiri, A. D., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan virus Corona (COVID-19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 1-11.
- Sugiono, S. (2021). Peran e-government dalam membangun Society 5.0: Tinjauan konseptual terhadap aspek keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Matra Pembaruan*, 5(2), 115-125. <https://doi.org/10.21787/mp.5.2.2021.115-125>
- Udayana, A. (2024). Inovasi digital dalam pelayanan SDM pemerintahan: Langkah menuju e-government efektif (Portal SISKOPi) di Kantor Otoritas Bandar Udara. *Jurnal Administrasi Publik Digital*, 8(1), 15-27.
- UNDP. (2023). *E-government readiness report: Bridging digital divides*. United Nations Development Programme. <https://www.undp.org/digital-gov-readiness>
- Universitas Brawijaya Malang, & Yunas, N. S. (2020). Implementasi e-government dalam meminimalisasi praktik rent seeking behaviour pada birokrasi Pemerintah Kota Surabaya. *Matra Pembaruan*, 4(1), 13-23. <https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.13-23>
- World Bank. (2023). *Digital transformation and public service innovation*. World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/digital-transformation2023>